

Judul : Revisi UU Gerakan Pramuka : Pramuka Minta Dukungan Megawati
Tanggal : Senin, 26 September 2016
Surat Kabar : Seputar Indonesia
Halaman : 4

REVISI UU GERAKAN PRAMUKA

Pramuka Minta Dukungan Megawati

JAKARTA - Kwartir Nasional Praja Muda Karana (Kwarnas Gerakan Pramuka) kemarin menemui Presiden Republik Indonesia kelima Megawati Soekarnoputri di kediamannya, Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat.

Dalam pertemuan itu, Ketua Kwarnas Adhyaksa Dault yang didampingi ketua kwarda dari 34 provinsi meminta dukungan Megawati atas pembahasan revisi UU Gerakan Pramuka. "Beliau (Adhyaksa Dault) ketika memberikan tanda penghargaan kepada saya lalu bertanya apakah sewaktu-waktu bersedia bincang-bincang dengan Praja Muda Karana dengan seluruh kwarda, 34 provinsi. Saya tentu saja membuka diri berdiskusi mengenai bangsa yang dapat kita manfaatkan," kata Megawati Soekarnoputri saat konferensi pers di kediamannya, Jakarta, kemarin.

Megawati mengungkapkan, secara prinsip mengenai hal yang menyangkut generasi muda dan masa depan bangsa, tentu dirinya memberikan dukungan secara penuh.

Sementara itu Adhyaksa Dault mengungkapkan, pihaknya berterima kasih sudah diterima hingga dua jam lebih

oleh Megawati. Dia bahkan mengaku bahwa sebenarnya Megawati masih ingin berdiskusi lebih lama dengan Gerakan Pramuka.

"Kita bicara Praja Muda Karana ke depan. Ibu memberikan banyak masukan, dari persoalan filosofis, taktis hingga teknis. Termasuk kami juga sampaikan revisi UU Gerakan Pramuka, Ibu menanggapi satu per satu. Kami rakorsus, bicara pembinaan generasi muda ke depan, secara terarah, terstruktur. Kita tahu bagaimana ancaman narkoba, psikotropika. Ibu pernah jadi voluntir soal itu," katanya.

Adhyaksa mengungkapkan, Pramuka Indonesia punya karakteristik sendiri, tidak ikut totalitas kepanduan dunia. Namun ada karakter tersendiri. Karenaitu, dalam poin revisi UU Gerakan Pramuka, pihaknya mendorong bagaimana Pramuka bisa lebih mandiri.

"Kami ini pendanaan kan mandiri, artinya di dalam UU itu, pemerintah itu ada lima hal. Pertama krusial bahwa pramuka ini pemerintah dapat membantu, boleh membantu boleh tidak. Nah, kesulitannya kita membina generasi muda, sementara boleh membantu



KORAN SINDO/VULANTO

Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga mantan Presiden Megawati Soekarnoputri (tiga kanan), Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault (dua kanan), didampingi sejumlah pengurus Pramuka lain memberikan keterangan usai menggelar pertemuan di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, kemarin. Pertemuan tersebut membahas berbagai masalah tentang Gerakan Pramuka dan rencana revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka.

boleh tidak (anggarannya), di daerah itu, kwarda dan kwarcab, akhirnya kalau pementannya mau membantu, kalau tidak ya tidak, akhirnya

tidak ada kewajiban. Ini keluhan teman-teman daerah," ujarnya.

Untuk revisi, lanjutnya, yang diinginkan UU Gerakan

Pramuka adalah kembali pada roh awalnya. Dia merujuk Keputusan Presiden Soekarno yang intinya bahwa Pramuka itu adalah perkumpulan pembina-

an generasi muda yang tidak membeda-bedakan suku, agama, latar belakang. "Karena itu, kami merasa UU ini ada sedikit keluar dari pakem

sehingga kami berharap perubahan UU dilakukan dengan mengembalikan roh ke asalnya," tandas dia.

●rahmatsahid